

**ANALISIS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG**

Aisya Yudiana Dewi, Maesaroh

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

This research is motivated by problems in waste management in Pemalang Regency which shows that the performance of the Environmental Agency has not reached the target in the last three years. The purpose of this study is to analyze the performance of the Pemalang Regency Environmental Agency in waste management and to identify the driving and inhibiting factors of performance. The theory used is the organizational performance theory proposed by Agus Dwiyanto and the performance factors proposed by Armstrong and Baron. This study uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results show that the performance of the Pemalang Regency Environmental Agency in waste management is in the optimal category, but several observed symptoms are still not optimal. The driving factors for performance include personal factors, team factors, and leadership factors. The inhibiting factors consist of system factors and contextual factors. The suggestions given are: (1) DLH needs to optimize the performance of officers and strengthen field supervision by controlling transportation schedules and a mechanism for quick response to public complaints; (2) DLH needs to increase digital socialization through social media and official platforms as an effort to educate and increase public awareness of sustainable waste management.

Keywords: *Performance, Management, Waste*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup belum mencapai target dalam tiga tahun terakhir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kinerja. Teori yang digunakan adalah teori kinerja organisasi yang dikemukakan Agus Dwiyanto dan faktor kinerja yang dikemukakan Amstrong dan Baron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah berada pada kategori sudah optimal, namun beberapa gejala yang diamati masih belum optimal. Faktor pendorong kinerja meliputi faktor personal, faktor tim, dan faktor kepemimpinan. Adapun faktor penghambat terdiri dari faktor sistem dan faktor kontekstual.. Saran yang diberikan adalah: (1) DLH perlu mengoptimalkan kinerja petugas dan memperkuat pengawasan lapangan melalui pengontrolan jadwal pengangkutan dan mekanisme tindak cepat terhadap pengaduan masyarakat; (2) DLH perlu meningkatkan sosialisasi digital melalui media sosial dan platform resmi sebagai upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kinerja, Pengelolaan, Sampah

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan hidup yang bersifat global seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas masyarakat, serta perubahan pola konsumsi yang semakin konsumtif. Peningkatan tersebut berdampak langsung pada bertambahnya volume timbulan sampah yang dihasilkan, apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ancaman kesehatan masyarakat, serta permasalahan sosial dan ekonomi. Mellyanawaty et al. (2021) menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan timbulan sampah,

Sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar pembangunan negara di dunia berisi 17 tujuan dan 169 target yang menjadi rencana aksi dunia untuk kurun waktu 15 tahun, terhitung sejak tahun 2015 hingga 2030. SDGs bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan.



Gambar 1.1 *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sumber : Bappenas

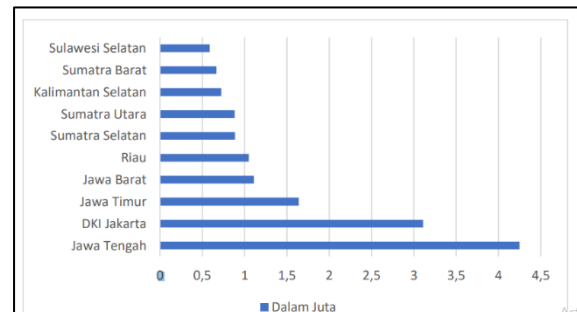
Sustainable Development Goals mencakup berbagai tujuan yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan termasuk tujuan yang berfokus pada pengelolaan sampah. Tujuan yang memiliki relevansi langsung dengan pengelolaan sampah adalah Tujuan ke 11 dan 12. Pada tujuan 11 *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) menekankan pentingnya menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut mencerminkan pentingnya upaya dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta terhindar dari permasalahan sampah. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan program bank sampah. (Sulistiyani & Wulandari, 2017). Pada Tujuan 12 *Responsible Consumption and Production* (Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan) berkaitan dengan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan yang menuntut perubahan perilaku masyarakat

sebagai penghasil sampah. Pencapaian tujuan ini memerlukan pembiasaan, sosialisasi, dan edukasi mengenai pengelolaan sampah (Sekarsari & Trianti, 2020).

Permasalahan sampah merupakan isu global yang dihadapi oleh berbagai negara akibat semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah bertambahnya produksi barang konsumsi seiring dengan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Barang-barang konsumsi tersebut pada akhirnya menjadi sampah yang menambah beban pengelolaan bagi pemerintah. Kompleksitas pengelolaan sampah ini semakin dirasakan oleh banyak negara, terutama negara berkembang, yang umumnya menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan kapasitas pengelolaan.

Di Indonesia permasalahan sampah terus menjadi tantangan besar karena tingginya volume sampah yang tidak tertangani dan masih terbatasnya infrastruktur yang memadai. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2024 tercatat bahwa total timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 37,311,750.55 ton. Dari total timbulan sampah tersebut 32.2% berhasil terkelola dan 67.8% tidak terkelola. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 286,6 juta

jiwa apabila tidak disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, maka volume sampah diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya.



Gambar 1.2 Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia (2023)

Sumber : Katadata.co.id (2023)

Berdasarkan data diatas Provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia adalah Jawa Tengah. Tingginya jumlah penduduk di Jawa Tengah berimplikasi pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan (Christina et al., 2015). Tingginya timbulan sampah yang tidak tertangani dengan baik sering kali menimbulkan berbagai persoalan lingkungan,. Permasalahan lingkungan di Jawa Tengah ditandai dengan masih banyaknya wilayah yang tergolong sebagai permukiman kumuh yang mencerminkan belum optimalnya pengelolaan kebersihan dan persampahan di daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan jumlah desa kumuh yang cukup tinggi. Kabupaten Pemalang tercatat menempati urutan pertama dengan

56 desa kumuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Kabupaten Pemalang masih cukup kompleks, terutama dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan permukiman. Timbunan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi lingkungan, hingga memunculkan kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat.

Kondisi tersebut tentu menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan. Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan harus dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana utama kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, volume timbunan sampah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.3 Produksi Sampah di Kabupaten Pemalang (Ton/hari)

Tahun	Produksi Sampah (Ton/Hari)	Terangkut (Ton/Hari)	Persentase Terangkut (%)	Sisa (Ton/Hari)	Persentase Sisa (%)
2020	350	246	70,29 %	104	29,71 %
2021	522	278	53,26 %	244	46,74 %
2022	460	263,6	57,30%	196	42,60 %
2023	597	270	45,23 %	327	53,56 %
2024	615	260	42,28 %	355	57,72 %

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2020, produksi sampah tercatat sebesar 350 ton per hari, dan meningkat secara signifikan hingga mencapai 615 ton per hari pada tahun 2024. Namun, peningkatan timbunan sampah tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan pengangkutan yang memadai. Pada tahun 2024, hanya sekitar 260 ton sampah per hari atau 42,28% yang berhasil diangkut, sementara sisanya sebesar 57,72% tidak tertangani secara optimal.

Permasalahan tersebut tercermin pula dalam capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), indikator kinerja pengelolaan sampah selama periode 2022–2024 belum mencapai target yang ditetapkan secara konsisten. Pada indikator penanganan sampah, realisasi kinerja hanya mencapai 59,50% pada tahun 2022, 59,60%

pada tahun 2023, dan mengalami penurunan menjadi 50,46% pada tahun 2024. Sementara itu, indikator pengurangan sampah juga menunjukkan capaian yang relatif rendah dan stagnan, yaitu 25,88% pada tahun 2022, 25,91% pada tahun 2023, dan 25,00% pada tahun 2024, yang seluruhnya berada di bawah target yang ditetapkan.

Belum optimalnya capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan utama. Kabupaten Pemalang hanya memiliki 17 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), sementara kebutuhan ideal mencapai 28 unit. Selain itu, jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia juga belum sebanding dengan kebutuhan riil. Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang hanya memiliki 45 unit armada pengangkut, sedangkan kebutuhan armada diperkirakan mencapai 173 unit. Ketimpangan ini berdampak pada keterlambatan pengangkutan dan terjadinya penumpukan sampah di berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang juga berkaitan dengan aspek pelayanan publik. Berbagai keluhan masyarakat terkait keterlambatan pengangkutan sampah dan lemahnya tindak

lanjut terhadap pengaduan menunjukkan bahwa aspek responsivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan sampah tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh faktor sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem kerja, serta kondisi lingkungan organisasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berdasarkan indikator kinerja organisasi publik serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kinerja dalam pengelolaan sampah.

KAJIAN TEORI

Kinerja Organisasi Publik

Kinerja organisasi publik merupakan gambaran tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja tidak hanya diukur dari hasil akhir yang dicapai, tetapi juga dari proses pelaksanaan pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, kinerja organisasi publik

mencerminkan kemampuan instansi pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Menurut Dwiyanto (2006), kinerja organisasi publik dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian kinerja organisasi publik tidak dapat dilepaskan dari persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan, selain capaian administratif dan teknis yang dihasilkan oleh organisasi.

Indikator Kinerja Organisasi Publik

Dwiyanto (2006) mengemukakan bahwa kinerja organisasi publik dapat diukur melalui lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1. Produktivitas

Produktivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output pelayanan secara optimal dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Dalam pengelolaan sampah, produktivitas dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah timbulan sampah dengan volume sampah yang berhasil ditangani atau diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Indikator ini mencerminkan keandalan pelayanan, ketepatan waktu pengangkutan, serta kondisi lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan persampahan.

3. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada kemampuan organisasi dalam mengenali, merespons, dan menindaklanjuti kebutuhan serta keluhan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah, responsivitas tercermin dari kecepatan dan ketepatan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait penumpukan sampah dan keterlambatan pengangkutan.

4. Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma administrasi yang berlaku. Pengelolaan sampah harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana organisasi publik dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan sampah, akuntabilitas tercermin dari

transparansi pelaporan kinerja serta kesesuaian antara target dan realisasi pengelolaan sampah.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja

Armstrong dan Baron (1998) menyatakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor personal, kepemimpinan, tim, sistem, dan faktor kontekstual atau situasional.

1. Faktor Personal

Faktor personal berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, motivasi, dan sikap individu dalam melaksanakan tugas. Dalam pengelolaan sampah, faktor personal memengaruhi bagaimana petugas lapangan menjalankan tugas pengangkutan dan pengelolaan sampah secara konsisten dan bertanggung jawab.

2. Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan mencerminkan peran pimpinan dalam memberikan arahan, motivasi, serta pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam mengoordinasikan sumber daya dan mendorong peningkatan kinerja organisasi.

3. Faktor Tim

Faktor tim berkaitan dengan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi antarpegawai

dalam organisasi. Pengelolaan sampah membutuhkan sinergi antarbidang dan unit kerja agar proses pelayanan dapat berjalan secara optimal.

4. Faktor Sistem

Faktor sistem mencakup kebijakan, prosedur kerja, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Keterbatasan armada pengangkut, TPS, dan TPS3R merupakan bagian dari faktor sistem yang dapat memengaruhi kinerja pengelolaan sampah.

5. Faktor Kontekstual atau Situasional

Faktor kontekstual berkaitan dengan kondisi lingkungan eksternal organisasi, seperti tekanan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Dalam pengelolaan sampah, tekanan masyarakat melalui keluhan atau media sosial dapat memengaruhi cara organisasi merespons pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada capaian kinerja secara kuantitatif, tetapi juga pada proses, dinamika, serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan sampah.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang dipilih berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pengelolaan sampah. Informan terdiri dari pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup, petugas lapangan pengelolaan sampah, serta masyarakat sebagai pengguna layanan persampahan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan sampah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), data Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode

untuk memastikan validitas dan keandalan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam Pengelolaan Sampah

Analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto, yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Produktivitas

Produktivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara volume timbulan sampah dengan jumlah sampah yang berhasil ditangani. Pada tahun 2024, timbulan sampah di Kabupaten Pemalang mencapai sekitar 615 ton per hari, sementara kapasitas pengangkutan hanya sebesar 260 ton per hari atau 42,28%. Artinya, lebih dari separuh sampah yang dihasilkan masyarakat belum dapat ditangani secara optimal.

Rendahnya produktivitas tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya armada pengangkut dan fasilitas pengolahan sampah. Jumlah armada pengangkut yang tersedia hanya

sebanyak 45 unit, jauh di bawah kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 173 unit. Selain itu, jumlah TPS3R yang tersedia juga belum mencukupi kebutuhan wilayah, sehingga proses pengurangan sampah dari sumbernya belum berjalan maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas kinerja DLH masih terhambat oleh faktor sistem, khususnya keterbatasan fasilitas pendukung.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang dinilai belum merata. Pada beberapa wilayah, layanan pengangkutan sampah telah berjalan cukup baik, namun di wilayah lain masih sering ditemukan keterlambatan pengangkutan dan penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Ketidakkonsistenan kualitas layanan ini berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan persampahan.

Keterbatasan armada dan personel lapangan menyebabkan jadwal pengangkutan tidak selalu dapat dipenuhi sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan. Selain itu, kondisi sarana pendukung yang kurang memadai turut memengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pengelolaan sampah belum sepenuhnya mampu memenuhi

harapan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Responsivitas

Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah tersedia mekanisme pengaduan masyarakat, dalam praktiknya tindak lanjut terhadap keluhan belum selalu dilakukan secara cepat dan tepat. Beberapa keluhan masyarakat terkait keterlambatan pengangkutan sampah menunjukkan bahwa respons organisasi belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam sistem pengelolaan pengaduan serta koordinasi internal. Tekanan masyarakat melalui keluhan langsung maupun media sosial menjadi faktor kontekstual yang memengaruhi kinerja, namun belum sepenuhnya direspons secara optimal oleh organisasi.

Responsibilitas

Dari aspek responsibilitas, pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta kebijakan daerah terkait

persampahan. Prosedur kerja dan pembagian tugas antarbidang telah ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja. Namun demikian, meskipun secara administratif telah sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis yang memengaruhi capaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan operasional yang memadai.

Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercermin melalui penyusunan laporan kinerja, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang memuat target dan realisasi kinerja pengelolaan sampah. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, adanya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya tercapai secara substantif. Meskipun laporan kinerja telah disusun secara rutin, hasil yang dicapai belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, khususnya pada indikator pengurangan dan penanganan sampah.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana dikemukakan oleh Armstrong dan Baron.

Faktor Pendorong Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pendorong yang berperan dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah. Faktor pendorong tersebut meliputi faktor personal, faktor tim, dan faktor kepemimpinan, yang secara bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah di lapangan.

Faktor Personal

Faktor personal menjadi salah satu faktor pendorong kinerja karena pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang memadai dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Pengalaman kerja tersebut membuat pegawai mampu memahami kondisi lapangan dan menyesuaikan pola kerja dengan situasi yang dihadapi. Selain itu, pegawai juga menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas, terutama dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana. Kemampuan pegawai untuk

beradaptasi dengan kondisi lapangan menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan sampah.

Faktor Tim

Faktor tim turut berperan sebagai faktor pendorong melalui adanya koordinasi antarpegawai yang berjalan dengan baik. Kerja sama antarpetugas memungkinkan pelaksanaan pengelolaan sampah tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai kendala operasional. Selain itu, adanya solidaritas dan sikap saling membantu antarpegawai ketika menghadapi permasalahan di lapangan memperkuat kinerja tim secara keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kekompakan tim menjadi penopang penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan juga menjadi faktor pendorong kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Pimpinan menunjukkan sikap responsif dalam menghadapi kondisi darurat persampahan, seperti penumpukan sampah atau gangguan operasional. Selain itu, pimpinan memberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada pegawai dalam menjalankan tugas, sehingga mampu menjaga semangat kerja dan tanggung jawab aparatur. Peran pimpinan ini membantu memastikan pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Faktor Penghambat Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah. Faktor penghambat tersebut meliputi faktor sistem dan faktor kontekstual, yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang.

Faktor Sistem

Faktor sistem menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang menyebabkan upaya peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pengadaan armada, peralatan, serta pengembangan fasilitas pendukung pengelolaan sampah. Selain itu, infrastruktur pengolahan sampah belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Ketimpangan ketersediaan infrastruktur, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan fasilitas pengolahan sampah, menyebabkan pelayanan pengelolaan sampah di beberapa wilayah belum berjalan secara maksimal.

Faktor Kontekstual

Faktor kontekstual juga menjadi penghambat kinerja dalam pengelolaan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, khususnya dalam hal pemilahan dan pembuangan sampah sesuai ketentuan, menyebabkan beban kerja Dinas Lingkungan Hidup semakin meningkat. Kondisi ini berdampak pada munculnya permasalahan penumpukan sampah di beberapa titik.

Volume timbulan sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan armada pengangkut dan tenaga kebersihan. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya yang tersedia menghambat optimalisasi pelayanan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah sudah optimal namun beberapa gejala masih perlu diperbaiki khususnya pada indikator produktivitas dan kualitas layanan. Produktivitas pengelolaan sampah masih belum mampu mengimbangi peningkatan volume timbulan sampah yang terus terjadi, sehingga sebagian sampah belum tertangani secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan pengelolaan sampah yang belum merata di seluruh wilayah, ditandai dengan masih

ditemukannya keterlambatan pengangkutan dan penumpukan sampah di beberapa titik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen atau kinerja individu pegawai. Melainkan disebabkan oleh keterbatasan faktor sistem dan faktor kontekstual. Keterbatasan jumlah armada pengangkut yang tidak sebanding dengan volume timbulan sampah, kondisi TPS yang mengalami overload, serta belum meratanya infrastruktur pengolahan sampah menjadi hambatan utama dalam peningkatan produktivitas dan kualitas layanan. Dukungan anggaran yang belum memadai turut membatasi upaya pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor kontekstual yang memengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Minimnya pemilahan sampah dari sumber dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan pembuangan sampah menyebabkan beban kerja pengelolaan sampah semakin meningkat. Dengan demikian, kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal organisasi, tetapi juga oleh dukungan lingkungan eksternal yang belum sepenuhnya optimal.

SARAN

1. Optimalisasi Kinerja Petugas dan Sistem Kerja

DLH perlu memperkuat pengawasan dan kontrol lapangan, terutama terkait jadwal pengangkutan dan tindak cepat laporan penumpukan sampah. Monitoring rutin dan koordinasi antarpetugas harus diperjelas agar pelayanan lebih disiplin dan responsif meski dengan SDM serta fasilitas yang terbatas.

2. Penguatan Sosialisasi Digital kepada Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah melalui media sosial dan website. Langkah ini tidak memerlukan banyak biaya, mudah dijangkau, dan efektif untuk meningkatkan kesadaran bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajrina, F. I., Putri, H. T., & Maryati, S. (2021). Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah. *Jurnal of Planning and Policy Development Insitut Teknologi Sumatera*, 1–10.
- Amstrong, M & Angelo Baron, 1998 *Performance Management*. London: Institute of Personal and Development.
- Anjasmari, N. M. M., & Nor'aini, N. (2023). Kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (Uppd) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1030>
- Aryani, G. A. P. D., Yasintha, P. N., & Wijaya, K. A. S. (2021). Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Jasa Akomodasi Pariwisata Villa Di Kabupaten Badung. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 1(1), 7-12.
- Bleskadit, H. M., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2020). Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong). *Jurnal Eksekutif*, 1(4).
- Cahyani, P. D., Adys, A. K., & Abdi. (2021). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(5), 1596–1614.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2012). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatonah, S. (2005). *Evaluasi Kerja Pengelolaan Sampah Domestik di Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang*.

- Fitri, D. A., & Sulistinah. (2020). *Faktor-faktor penyebab munculnya permukiman kumuh daerah perkotaan di Indonesia (sebuah studi literatur)*. Universitas Negeri Surabaya.
- Geografi, P., Geografi, J., & Makassar, U. N. (2024). *Pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung SDGs Tahun 2030 (Tujuan 11 - Kota dan permukiman yang berkelanjutan) di Kota Makassar*. 3(2), 111–120.
- Grasia, E., & Kismartini, M. (n. d.). *ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA SEMARANG*.
- Jurnal, J. :, Publik, M., Publik, K., Sonia, E., Hazzah, S., & Ritonga, N. (2024). *Performance of the Environmental Agency in Managing Waste in North Rantau District, Labuhanbatu Regency*. 6. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP>.
- Nurhalimah, & Amirulmukminin. (2023). *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana BPBD Daerah Kabupaten Bima Dalam Penanggulangan Korban Bencana Banjir*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan, <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.578>
- Purnama, E. N., Saragih, D. P., Lekatompessy, R. L., & Kontu, F. (2024). *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah di Kota Merauke*. Jurnal Administrasi Karya Dharma, 3(2), 1-9.
- Putu, G. A., Aryani, D., Yasintha, N., Adi, K., Wijaya, S., Sudirman, P. B., Klod, D. P., Denpasar Barat, K., & Denpasar, K. (2021). *Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Jasa Akomodasi Pariwisata Villa Di Kabupaten Badung*. In *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* (Vol. 1, Issue 1).
- Raharjo, A. T. (2018). *Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat*. Juristek, 5(1). <http://juristek.utama.ac.id/index.php/jtk/article/view/3>
- Rahardjo, M. (2021). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah di pasar banjarsari*. 2, 192–199.
- Setiawan, S., Kurniawan, P. C., & Pujiati, P. (2022). *KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN KERJA PADA UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG*. Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 10(1), 35-44.
- Sonia, E., & Ritonga, S. H. N. (2024). *Performance of the Environmental Agency in managing waste in North Rantau District, Labuhanbatu Regency*. JMPKP: Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, 6(2), 195–209.